



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.905, 2015

KEMENDESA-PDT-Trans.

Urusan

Pemerintahan. Ditjen Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa. TA 2015. Pelimpahan.

**PERATURAN MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL
DAN TRANSMIGRASI
NOMOR 8 TAHUN 2015
TENTANG**

**PELIMPAHAN URUSAN PEMERINTAHAN LINGKUP DIREKTORAT
JENDERAL PEMBANGUNAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA
KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN
TRANSMIGRASI TAHUN ANGGARAN 2015**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

**MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN
TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah yang dilaksanakan oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi pada tahun 2015, sebagian urusan pemerintahan perlu dilimpahkan kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah di wilayah Provinsi melalui Dekonsentrasi;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 16 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan urusan pemerintahan Lingkup Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi yang akan dilimpahkan kepada Gubernur perlu ditetapkan dengan Peraturan Menteri;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia tentang Pelimpahan Urusan Pemerintahan Lingkup Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Tahun 2015;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
 3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
 4. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan belanja Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 44, dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5669);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 74, dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4407);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas Dan Wewenang Serta Kedudukan Keuangan Gubernur Sebagai Wakil

- Pemerintah Di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 25, dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5107), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas Dan Wewenang Serta Kedudukan Keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 44, dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5209);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 152, dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5178);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
 11. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019;
 12. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 43 Tahun 2014 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2015;
 13. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2015 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2015;
 14. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA TENTANG PELIMPAHAN URUSAN PEMERINTAHAN LINGKUP DIREKTORAT JENDERAL PEMBANGUNAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA KEMENTERIAN

**DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN
TRANSMIGRASI TAHUN 2015.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Pejabat Eselon I Pembina adalah pimpinan unit organisasi Eselon I/komponen pembina kegiatan dekonsentrasi Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi sesuai tugas dan fungsinya.
2. Pejabat Eselon II Pembina adalah pimpinan unit organisasi Eselon II pada unit organisasi Eselon I Pembina yang bertanggungjawab atas teknis pembinaan kegiatan dekonsentrasi Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi sesuai tugas dan fungsinya.
3. Dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang dari pemerintah kepada gubernur sebagai wakil pemerintah dan/atau kepada instansi vertikal di wilayah tertentu.
4. Dana Dekonsentrasi adalah dana yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang dilaksanakan oleh gubernur sebagai wakil pemerintah yang mencakup semua penerimaan dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan Dekonsentrasi, tidak termasuk dana yang dialokasikan untuk instansi vertikal pusat di daerah.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD, adalah organisasi/lembaga pada pemerintah daerah yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan kegiatan dekonsentrasi di bidang tertentu di daerah provinsi.
6. Kuasa Pengguna Anggaran, yang selanjutnya disingkat KPA, adalah Kepala SKPD atau pejabat dengan eselonering satu tingkat di bawah Kepala SKPD pada SKPD yang bertanggung jawab atas pengelolaan anggaran dan barang/jasa yang dibiayai dari DIPA dekonsentrasi.
7. Pejabat Pembuat Komitmen, yang selanjutnya disingkat PPK, adalah pejabat dengan eselonering satu tingkat di bawah Kepala SKPD yang diberi kewenangan oleh KPA untuk mengambil keputusan dan/atau tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran atas beban belanja negara.
8. Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar, yang selanjutnya disingkat PP-SPM, adalah pegawai negeri sipil yang menangani bidang keuangan dalam lingkup SKPD yang sama dengan KPA, yang diberikan kewenangan oleh KPA untuk melakukan pengujian atas surat permintaan pembayaran dan menandatangani surat perintah membayar.

9. **Bendahara Pengeluaran**, adalah pegawai negeri sipil dalam lingkup SKPD yang sama dengan KPA dan telah mempunyai sertifikat bendahara, yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang atau barang untuk keperluan belanja negara dalam rangka pelaksanaan DIPA dekonsentrasi.
10. **Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara** yang selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan ditetapkan dengan undang-undang.
11. **Rencana Kerja Kementerian/Lembaga**, yang selanjutnya disingkat Renja-KL, adalah dokumen perencanaan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi untuk periode 1 (satu) tahun.
12. **Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga**, yang selanjutnya disingkat RKA-KL, adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi program dan kegiatan suatu Kementerian/Lembaga yang merupakan penjabaran dari Rencana Kerja Pemerintah dan Rencana Strategis Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi 1 (satu) tahun anggaran, serta anggaran yang diperlukan untuk melaksanakannya.
13. **Daftar isian Pelaksanaan Anggaran**, yang selanjutnya disingkat DIPA atau dokumen lain yang dipersamakan dengan DIPA, adalah suatu dokumen pelaksanaan anggaran yang dibuat oleh Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi serta disahkan oleh Menteri Keuangan dan berfungsi sebagai dokumen pelaksanaan pendanaan kegiatan serta dokumen pendukung kegiatan akuntansi Pemerintah.
14. **Program** adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan instansi pemerintah/lembaga untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran, atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah.
15. **Kegiatan** adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa satuan kerja sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang bersifat personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan untuk menghasilkan keluaran dalam bentuk barang/jasa.
16. **Menteri**, adalah Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.

17. Kementerian adalah Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.

BAB II PELIMPAHAN

Pasal 2

- (1) Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah yang dilaksanakan Kementerian pada tahun 2015, dapat dilimpahkan kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah di wilayah provinsi.
- (2) Pelimpahan urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui mekanisme dekonsentrasi.

Pasal 3

Pelimpahan urusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dilaksanakan secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggungjawab sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

- (1) Urusan pemerintahan yang dilimpahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dijabarkan dalam bentuk rencana program, kegiatan, dan anggaran dekonsentrasi.
- (2) Urusan pemerintahan yang dilimpahkan dan/atau ditugaskan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai RKP, Renja-KL, dan RKA-KL.

BAB III MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 5

Dekonsentrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dimaksudkan untuk mensinergikan hubungan pusat dan daerah.

Pasal 6

Dekonsentrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 bertujuan untuk:

- a. meningkatkan peran gubernur dalam percepatan pendampingan pendamping desa dalam rangka Implementasi Undang-Undang Desa;
- b. meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan bidang pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa; dan
- c. meningkatkan pengelolaan pembangunan dan pelayanan terhadap masyarakat desa.

BAB IV PROGRAM DEKONSENTRASI

Pasal 7

Program kegiatan dan anggaran dekonsentrasi lingkup Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Tahun Anggaran 2015 merupakan Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.

Pasal 8

- (1) Rencana program, kegiatan dan anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dituangkan dalam RKA-KL dan DIPA.
- (2) Tata cara penyusunan RKA-KL dan DIPA serta penetapan/pengesahannya berpedoman pada peraturan perundang-undangan.
- (3) Rencana program kegiatan dan anggaran yang telah ditetapkan dalam RKA-KL dan DIPA Lokasi dan Alokasi dana dekonsentrasi sebagaimana tercantum dalam lampiran dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB V**KOORDINASI PROGRAM DAN KEGIATAN DEKONSENTRASI****Pasal 9**

- (1) Menteri melalui Sekretaris Jenderal mengkoordinasikan perumusan kebijakan dan penatausahaan pelaksanaan program dan kegiatan dekonsentrasi dengan pejabat eselon I Pembina dan gubernur.
- (2) Pejabat eselon I Pembina mengkoordinasikan kebijakan teknis dan penatausahaan penyelenggaraan program dan kegiatan dekonsentrasi dengan pejabat eselon II dan para kepala SKPD pelaksana dekonsentrasi di daerah.
- (3) Pejabat eselon II Pembina mengkoordinasikan pelaksanaan teknis dan penyelenggaraan program dan kegiatan dekonsentrasi dengan para pejabat pengelola kegiatan di daerah.

Pasal 10

- (1) Gubernur dalam melaksanakan rencana program, kegiatan dan anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat , bertugas:
 - a. melakukan sinkronisasi dengan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah;
 - b. menetapkan SKPD dan menyiapkan perangkat daerah untuk melaksanakan program dan kegiatan; dan
 - c. melaksanakan program, kegiatan, dan anggaran secara efektif dan efisien sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang telah ditentukan oleh pemerintah.
- (2) Gubernur memberitahukan rencana program, kegiatan dan anggaran dekonsentrasi Tahun 2015 kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

Gubernur mengkoordinasikan penatausahaan pelaksanaan, penyaluran dan pertanggung jawaban keuangan dan barang dengan pimpinan instansi vertikal di bidang keuangan di daerah.

Pasal 12

- (1) Gubernur melakukan koordinasi pelaksanaan kegiatan dekonsentrasi di wilayahnya dengan Sekretaris Jenderal.

- (2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup aspek perencanaan, penatausahaan anggaran, pencapaian realisasi anggaran, pengendalian dan pelaporan kegiatan dekonsentrasi Kementerian.
- (3) Dalam melakukan koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), gubernur menugaskan SKPD provinsi yang membidangi Perencanaan Pembangunan Daerah.

BAB VI PELAKSANAAN

Pasal 13

- (1) Kegiatan dekonsentrasi dilaksanakan oleh SKPD provinsi.
- (2) SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan oleh gubernur kepada menteri.

Pasal 14

Penetapan SKPD pelaksana kegiatan dekonsentrasi dan tugas pembantuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) diatas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 15

Gubernur menunjuk dan menetapkan pejabat perbendaharaan pelaksana kegiatan dekonsentrasi dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 16

Pejabat perbendaharaan pelaksana kegiatan dekonsentrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 meliputi:

- a. KPA;
- b. PPK;
- c. PP-SPM; dan
- d. Bendahara Pengeluaran.

Pasal 17

Gubernur dapat mendelegasikan kewenangan kepada KPA untuk menunjuk dan menetapkan PPK, PP-SPM, dan Bendahara Pengeluaran kegiatan dekonsentrasi.

Pasal 18

Keputusan Gubernur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 memuat tugas dan tanggung jawab KPA antara lain:

- (1) menyusun dan menandatangani DIPA berdasarkan RKA-K/L yang disusun dan ditetapkan oleh pejabat Eselon I Pembina;
- (2) menyusun dan menetapkan petunjuk operasional kegiatan sebagai penjabaran lebih lanjut dari DIPA.

Pasal 19

- (1) Penyusunan DIPA dan petunjuk operasional kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) DIPA dan petunjuk operasional kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada pejabat Eselon I Pembina, Sekretariat

Jenderal dan SKPD Provinsi yang membidangi Perencanaan Pembangunan Daerah.

- (3) Penyampaian DIPA dan petunjuk operasional kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan paling lambat tiga puluh hari kerja setelah diterimanya pengesahan DIPA dari Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan.

Pasal 20

KPA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf a bertanggungjawab terhadap:

- a. pelaksanaan fisik dan keuangan kegiatan dekonsentrasi.
- b. penyelenggaraan kegiatan sesuai dengan RKA-KL yang telah ditetapkan dalam DIPA.

Pasal 21

- (1) Dalam pelaksanaan DIPA dekonsentrasi, dapat dilakukan revisi anggaran.
- (2) Revisi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa perubahan rincian anggaran, meliputi penambahan atau pengurangan rincian anggaran belanja dalam hal pagu anggaran berubah.
- (3) Revisi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa perubahan rincian anggaran belanja dalam hal pagu anggaran tetap.
- (4) Tata cara pelaksanaan revisi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII

PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN

Pasal 22

- (1) Kepala SKPD pelaksana dekonsentrasi wajib menyusun laporan manajerial.
- (2) Laporan manajerial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
 - a. perkembangan realisasi penyerapan dana;
 - b. pencapaian target keluaran;
 - c. kendala yang dihadapi; dan
 - d. saran tindak lanjut.

Pasal 23

- (1) KPA dana dekonsentrasi wajib menyusun laporan akuntabilitas.
- (2) Laporan akuntabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat laporan keuangan dan laporan barang milik negara.
- (3) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
 - a. neraca;
 - b. laporan realisasi anggaran; dan
 - c. catatan atas laporan keuangan.

Pasal 24

Penyusunan dan penyampaian laporan manajerial dan laporan akuntabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 dan Pasal 23 diatur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 25

- (1) Gubernur menyampaikan laporan tahunan pelaksanaan dekonsentrasi Lingkup Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi kepada menteri.
- (2) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertakan dalam Laporan Pertanggungjawaban APBD kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- (3) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bukan merupakan satu kesatuan dalam laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.
- (4) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah secara bersama-sama atau terpisah dengan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.

BAB VIII**PEMBINAAN DAN PENGAWASAN****Pasal 26**

- (1) Menteri melakukan pembinaan dan pengawasan pengelolaan dekonsentrasi.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pemberian pedoman;
 - b. fasilitasi;
 - c. pelatihan;
 - d. bimbingan teknis; dan
 - e. pemantauan dan evaluasi.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan dekonsentrasi.
- (4) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh aparat pengawas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX**BARANG HASIL PELAKSANAAN DEKONSENTRASI****Pasal 27**

- (1) Barang yang diperoleh dari dana dekonsentrasi merupakan barang milik Negara.
- (2) Kepala SKPD pelaksana dekonsentrasi wajib melakukan penatausahaan barang milik negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 28

Barang yang diperoleh dari dana dekonsentrasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 27 dicatat sebagai aset persediaan.

Pasal 29

- (1) Barang milik negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 dapat dihibahkan kepada pemerintah daerah.
- (2) Tata cara hibah barang milik negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X**KETENTUAN PENUTUP****Pasal 30**

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 18 Juni 2015
MENTERI DESA,
PEMBANGUNAN DAERAH
TERTINGGAL DAN
TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA,

MARWAN JAFAR

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 19 Juni 2015
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

YASONNA H. LAOLY

LAMPIRAN I
 PERATURAN MENTERI DESA, PEMERANGAN DAERAH TERKINGGAL DAN
 TRANSMIGRASI RUMAH KOTA INDONESIA
 NOMOR 8 TAHUN 2015
 TENTANG
 PELAKSANAAN TUJUAN PEMERINTAH LINGKUP DEKONSENTRASI KEMERDEKAAN
 PEMBANGUNAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA KEMERDEKAAN
 DESA, PEMERANGAN DAERAH TERKINGGAL DAN TRANSMIGRASI TAHUN
 ANGGARAN 2015

**LOKASI DAN ALOKASI DANA DEKONSENTRASI
 PROGRAM PEMBANGUNAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA
 BERDASARKAN DIPA TAHUN ANGGARAN 2015**

NO	LOKASI	Fasilitasi Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Fasilitasi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan-Generasi Sehat Cerdas (PNPM-GSC)	Jumlah
1	2	3	4	5
1	Jawa Barat	99,697,702,000	9,989,279,000	109,686,981,000
2	Jawa Tengah	119,281,511,000		119,281,511,000
3	D.I Yogyakarta	9,682,905,000		9,682,905,000
4	Jawa Timur	128,188,820,000	6,381,267,000	134,573,087,000
5	Nanggroe Aceh Darussalam	88,091,863,000		88,091,863,000
6	Sumatera Utara	86,067,795,000		86,067,795,000
7	Sumatera Barat	29,228,132,000		29,228,132,000
8	Riau	27,516,617,000		27,516,617,000
9	Jambi	25,559,950,000		25,559,950,000
10	Sumatera Selatan	43,722,559,000	5,457,727,000	49,180,286,000
11	Lampung	42,014,723,000		42,014,723,000
12	Kalimantan Barat	35,020,362,000	10,160,422,000	45,180,784,000
13	Kalimantan Tengah	30,603,119,000	8,726,957,000	39,330,076,000
14	Kalimantan Selatan	32,358,303,000		32,358,303,000
15	Kalimantan Timur	19,464,417,000		19,464,417,000
16	Sulawesi Utara	31,611,776,000	4,612,773,000	36,224,549,000
17	Sulawesi Tengah	36,457,083,000		36,457,083,000
18	Sulawesi Selatan	53,088,128,000		53,088,128,000
19	Sulawesi Tenggara	39,591,378,000		39,591,378,000

NO	LOKASI	Fasilitasi Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Fasilitasi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan-Generasi Sehat Cerdas (PNPM-GSC)	Jumlah
1	2	3	4	5
21	Bali	14,643.107,000		14.643.107.000
22	Nusa Tenggara Barat	20,407,426,000	9,262,507,000	29,669,933,000
23	Nusa Tenggara Timur	63,970,891,000	12,811,418,000	76,782,309,000
24	Papua	123,147,176,000		123,147,176,000
25	Bengkulu	21,765,362,000		21,765,362,000
26	Maluku Utara	21,845,104,000		21,845,104,000
27	Banten	23,362,271,000		23,362,271,000
28	Bangka Belitung	7,764,992,000		7,764,992,000
29	Gorontalo	14,851,220,000	4,055,629,000	18,906,849,000
30	Kepulauan Riau	10,188,919,000		10,188,919,000
31	Papua Barat	38,305,525,000		38,305,525,000
32	Sulawesi Barat	13,592,028,000	3,596,020,000	17,188,028,000
33	Kahmanlan Utara	9,492,920,000		9,492,920,000
	JUMLAH	1,391,608,320,000	79,605,713,000	1,461,721,113,000

MENTERI DESA,
PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN
TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA,

MARWAN JAFAR

Lampiran II
 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal
 dan Transmigrasi
 Nomor : 8 Tahun 2015
 Tentang :
 Pelimpahan Urusan Perseorangan Jajkap Direktorat Jenderal
 Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa
 Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan
 Transmigrasi Tahun Anggaran 2015

**DAFTAR LOKASI DAN ALOKASI BLM
 PNPM GENERASI SEHAT DAN CERDAS (PNPM GENERASI)
 TAHUN ANGGARAN 2015**

NO	PROVINSI / KABUPATEN / KECAMATAN		JUMLAH		SUMBER	TOTAL ALOKASI
			KAB	KEC		
1	2		3	4	5	6
1	JAWA BARAT		7	84		74,577,524,000
	1	KAB. SUKABUMI	1	22		19,309,250,000
		1 Simpenan			RM	894,250,000
		2 Cikakak			RM	1,043,950,000
		3 Cisolok			RM	950,400,000
		4 Lengkok			RM	987,500,000
		5 Janpang Tengah			RM	922,150,000
		6 Bojong Genteng			RM	981,300,000
		7 Cidahu			RM	929,850,000
		8 Kabandungan			RM	1,001,650,000
		9 Waluran			RM	701,650,000
		10 Janpang Kulon			RM	986,300,000
		11 Cibitung			RM	701,650,000
		12 Ciracap			RM	929,850,000
		13 Gunung Gumih			RM	907,150,000
		14 Kadudampit			RM	1,033,000,000
		15 Caringin			RM	1,033,000,000
		16 Kelan Pales			RM	681,300,000
		17 Cireunggis			RM	981,300,000
		18 Sukalarang			RM	694,250,000
		19 Paluarau			RM	915,700,000
		20 Purabaya			RM	715,700,000
		21 Curug Kembar			RM	715,700,000
		22 Cidadak			RM	601,650,000
	2	KAB. CIANJUR	1	8		8,859,900,000
		1 Sukaluyu			RM	1,095,900,000
		2 Cikadongkolan			RM	1,221,000,000
		3 Sukaresmi			RM	1,122,150,000
		4 Gelombang			RM	1,070,100,000
		5 Ciraung			RM	1,083,000,000
		6 Made			RM	1,136,300,000
		7 Campakanulva			RM	1,037,500,000
		8 Pasirkuda			RM	1,093,950,000

NO	PROVINSI / KABUPATEN / KECAMATAN		JUMLAH		SUMBER	TOTAL ALOKASI
			KAB	KEC		
1	2		3	4	5	6
	3	KAB. GARUT	1	10		10,817,300,000
		1 Karangtengah			RM	1,028,350,000
		2 Sukaresmi			RM	1,062,150,000
		3 Singajaya			RM	1,088,000,000
		4 Cibalong			RM	1,127,150,000
		5 Pamulihan			RM	1,012,500,000
		6 Louwigoong			RM	1,073,100,000
		7 Kersamanah			RM	1,049,250,000
		8 Bayongbong			RM	1,226,000,000
		9 Peundeuy			RM	1,056,650,000
		10 Sucinaraja			RM	1,062,150,000
	4	KAB. KUNINGAN	1	20		15,819,774,000
		1 Cibiru			RM	643,950,000
		2 Subang			RM	724,250,000
		3 Ciwaru			RM	786,300,000
		4 Luragung			RM	723,450,000
		5 Lebakwangi			RM	809,700,000
		6 Garawangi			RM	856,850,000
		7 Ciawigebang			RM	1,076,800,000
		8 Cidahu			RM	1,071,750,000
		9 Cihurus			RM	809,700,000
		10 Selajambe			RM	613,700,000
		11 Darma			RM	1,083,174,000
		12 Cipicung			RM	645,900,000
		13 Pancalang			RM	784,700,000
		14 Cimahi			RM	758,050,000
		15 Cilebak			RM	621,250,000
		16 Hartara			RM	629,850,000
		17 Cibeureum			RM	729,850,000
		18 Karangkacana			RM	743,950,000
		19 Maleber			RM	1,012,750,000
		20 Cigandamekar			RM	678,850,000
	5	KAB. SUMEDANG	1	14		11,073,800,000
		1 Wado			RM	938,850,000
		2 Situraja			RM	797,600,000
		3 Pasoh			RM	645,900,000
		4 Surian			RM	733,000,000
		5 Buahdua			RM	697,600,000
		6 Sukasari			RM	720,100,000
		7 Pamulihan			RM	938,850,000
		8 Rancakalong			RM	745,900,000
		9 Sumedang Utara			RM	934,700,000
		10 Ganas			RM	720,100,000
		11 Tanjungkerta			RM	771,750,000
		12 Tanjungmedar			RM	733,000,000
		13 Cimelaka			RM	997,600,000

NO	PROVINSI / KABUPATEN / KECAMATAN	JUMLAH		SUMBER	TOTAL ALOKASI
		KAB	KEC		
1	2	3	4	5	6
	14 Tomo			RM	658,850,000
6	KAB. SUBANG	1	4		3,039,050,000
	1 Binong			RM	753,000,000
	2 Tanjungsiang			RM	945,900,000
	3 Cihogo			RM	633,000,000
	4 Legonkulon			RM	707,150,000
7	KAB. BANDUNG BARAT	1	6		5,658,450,000
	1 Cilampelas			TF	975,900,000
	2 Cihlin			TF	1,148,850,000
	3 Rongga			TF	1,110,100,000
	4 Cipeundeuy			TF	801,750,000
	5 Sindangkerita			TF	788,850,000
	6 Gunungghalu			TF	883,000,000
2	JAWA TIMUR	5	50		45,205,050,000
	KAB. TRENGGALEK	1	8		7,512,000,000
	1 Munjungan			RM	972,150,000
	2 Pule			RM	958,050,000
	3 Dongko			RM	1,058,050,000
	4 Kempak			RM	615,700,000
	5 Watulimo			RM	921,750,000
	6 Bendungan			RM	1,029,850,000
	7 Gandusari			RM	958,850,000
	8 Durenan			RM	997,600,000
2	KAB. MALANG	1	14		11,994,900,000
	1 Domomulyo			RM	745,900,000
	2 Pagak			RM	929,850,000
	3 Bantur			RM	758,050,000
	4 Sumberuanjing			RM	828,650,000
	5 Wetan			RM	950,400,000
	6 Bukulawang			RM	947,600,000
	7 Tajinan			RM	971,750,000
	8 Ngajum			RM	933,000,000
	9 Wagir			RM	771,750,000
	10 Ngantang			RM	1,000,400,000
	11 Kasembon			RM	691,250,000
	12 Gedangan			RM	754,850,000
	13 Tirtoyudo			RM	800,400,000
	14 Pagelaran			RM	908,050,000
3	KAB. NGANJUK	1	11		10,073,350,000
	1 Sawahan			RM	743,950,000
	2 Ngetos			RM	733,000,000
	3 Berbek			RM	1,162,200,000
	4 Loeret			RM	1,050,950,000
	5 Pace			RM	999,300,000

NO	PROVINSI / KABUPATEN / KECAMATAN		JUMLAH		SUMBER	TOTAL ALOKASI
			KAB	KEC		
1	2		3	4	5	6
	6	Prambon			RM	947,600,000
	7	Ngronggot			RM	934,700,000
	8	Sukomoro			RM	971,750,000
	9	Wilangan			RM	694,250,000
	10	Rejoso			RM	1,076,800,000
	11	Jatilakari			RM	738,850,000
4	KAB. MAGETAN		1	9		7,188,000,000
	1	Poncol			RM	629,850,000
	2	Lemheyan			RM	770,900,000
	3	Kawedanan			RM	900,100,000
	4	Plosan			RM	853,050,000
	5	Panekan			RM	1,056,850,000
	6	Bendo			RM	848,450,000
	7	Barat			RM	697,600,000
	8	Karas			RM	658,850,000
	9	Nguntoronadi			RM	771,750,000
5	KAB. PAMEKASAN		1	8		8,436,800,000
	1	Tlanakan			RM	1,136,350,000
	2	Pademawan			RM	1,050,950,000
	3	Palengaan			RM	1,086,300,000
	4	Lanugan			RM	997,600,000
	5	Waru			RM	1,086,300,000
	6	Batumarmar			RM	1,100,400,000
	7	Kadur			RM	1,043,900,000
	8	Pascan			RM	933,000,000
3	NUSA TENGGARA BARAT		8	64		78,060,130,000
1	KAB. LOMBOK BARAT		1	8		8,677,950,000
	1	Gerung			RM	1,097,600,000
	2	Narmada			RM	1,188,050,000
	3	Sekotong			RM	1,043,950,000
	4	Gumingsari			RM	1,112,750,000
	5	Lingsar			RM	1,123,450,000
	6	Lambar			RM	1,058,050,000
	7	Batulayar			RM	1,029,850,000
	8	Kuripan			RM	994,250,000
2	KAB. LOMBOK TENGAH		1	10		11,108,850,000
	1	Jonggat			TF	1,122,700,000
	2	Batuksiang			TF	1,083,900,000
	3	Pujut			TF	1,200,050,000
	4	Praya Barat			TF	1,108,200,000
	5	Praya Timur			TF	1,096,050,000
	6	Janapria			TF	1,109,750,000
	7	Pringgabaya			TF	1,096,850,000
	8	Praya Tengah			TF	1,109,750,000
	9	Praya Barat Daya			TF	1,123,500,000

NO	PROVINSI / KABUPATEN / KECAMATAN	JUMLAH		SUMBER	TOTAL ALOKASI
		KAB	KEC		
1	2	3	4	5	6
	10 Batukliang Utara			TF	1,058,100,000
3	KAB. LOMBOK TIMUR	1	9		10,065,350,000
	1 Keruak			TF	1,148,500,000
	2 Sukamulia			TF	1,071,000,000
	3 Pringgabaya			TF	1,148,500,000
	4 Saubalia			TF	1,096,850,000
	5 Moulong Gading			TF	1,058,100,000
	6 Suralaga			TF	1,148,500,000
	7 Suela			TF	1,058,100,000
	8 Sakra Barat			TF	1,187,300,000
	9 Jerowaru			TF	1,148,500,000
4	KAB. SUMBAWA	1	12		11,156,700,000
	1 Lunyuk			TF	1,062,250,000
	2 Utan			TF	1,081,950,000
	3 Lape			TF	1,011,350,000
	4 Plampang			TF	1,123,500,000
	5 Empang			TF	808,200,000
	6 Alas Barat			TF	1,067,850,000
	7 Labuhan Badus			TF	1,062,250,000
	8 Labangka			TF	1,031,650,000
	9 Lopok			TF	1,053,700,000
	10 Lenangguar			TF	616,350,000
	11 Orong Telu			TF	621,300,000
	12 Leutung			TF	616,350,000
5	KAB. SUMBAWA BARAT	1	4		4,267,550,000
	1 Jereweh			TF	1,016,350,000
	2 Seteluk			TF	1,096,050,000
	3 Sekongkang			TF	1,062,250,000
	4 Bang Rea			TF	1,092,900,000
6	KAB. LOMBOK UTARA	1	5		5,256,300,000
	1 Tanjung			TF	1,053,700,000
	2 Gangga			TF	1,025,500,000
	3 Bayan			TF	1,092,900,000
	4 Kayangan			TF	1,067,850,000
	5 Pemenuang			TF	1,016,350,000
7	KAB. DOMPU	1	8		13,973,680,000
	1 Dompu			TF	1,918,650,000
	2 Kempo			TF	1,835,700,000
	3 Hu'u			TF	710,700,000
	4 Kilo			TF	1,828,950,000
	5 Woja			TF	1,951,450,000
	6 Pekar			TF	1,936,100,000
	7 Manggelawa			TF	1,905,480,000
	8 Paju			TF	1,826,650,000

NO	PROVINSI / KABUPATEN / KECAMATAN		JUMLAH		SUMBER	TOTAL ALOKASI
			KAB	KEC		
1	2		3	4	5	6
	8	KAB. BIMA	1	8		13,553,750,000
		1 Monta			TF	2,031,450,000
		2 Belo			TF	768,950,000
		3 Sape			TF	2,092,650,000
		4 Wera			TF	2,031,450,000
		5 Donggo			TF	1,971,900,000
		6 Saunggar			TF	1,908,950,000
		7 Ambalawi			TF	733,950,000
		8 Lambu			TF	2,031,450,000
4	NUSA TENGGARA TIMUR		10	78		65,193,450,000
	1	KAB. TIMOR TENGAH UTARA	1	13		10,257,400,000
		1 Momiŋga Barat			TF	854,100,000
		2 Noemuti Kota			TF	838,800,000
		3 Kefamenuu			TF	792,900,000
		4 Biboki Utara			TF	792,900,000
		5 Biboki Anleu			TF	792,900,000
		6 Insana			TF	913,350,000
		7 Noemuti Timur			TF	716,350,000
		8 Momiŋga Tengah			TF	746,950,000
		9 Misi			TF	746,950,000
		10 Mufis			TF	721,300,000
		11 Insana Barat			TF	838,800,000
		12 Insana Tengah			TF	762,250,000
		13 Biboki Fentleu			TF	737,850,000
	2	KAB. BELU	1	9		6,585,000,000
		1 Raihamul			RM	754,900,000
		2 Lenuakneu			RM	765,850,000
		3 Tasiteto Timur			RM	800,800,000
		4 Raihat			RM	708,950,000
		5 Tasifeto Barat			RM	739,550,000
		6 Kakuluk Mesak Lenuakneu			RM	708,950,000
		7 Selatan			RM	749,300,000
		8 Alambua Barat			RM	678,350,000
		9 Alambua Selatan			RM	678,350,000
	3	KAB. MALAKA	1	8		6,716,450,000
		1 Malaka Tengah			TF	913,350,000
		2 Lacu Manen			TF	792,900,000
		3 Welimar			TF	869,450,000

NO	PROVINSI / KABUPATEN / KECAMATAN	JUMLAH		SUMBER	TOTAL ALOKASI
		KAB	KEC		
1	2	3	4	5	6
	4 Malaka Timur			TF	746,950,000
	5 Malaka Barat			TF	919,300,000
	6 Rinhat			TF	985,350,000
	7 Io Kufeu			TF	770,800,000
	8 Kobalima Timur			TF	716,350,000
4	KAB. FLORES TIMUR	1	4		3,623,500,000
	1 Wulanggitang			TF	823,500,000
	2 Lamautuka			TF	961,300,000
	3 Solor Barat			TF	902,850,000
	4 Solor Timur			TF	935,850,000
5	KAB. MANGGARAI	1	2		1,775,200,000
	1 Wae Rii			TF	877,350,000
	2 Cibai			TF	897,850,000
6	KAB. SUMBA TIMUR	1	10		7,707,650,000
	1 Halharu			TF	762,250,000
	2 Tabundung			TF	808,200,000
	3 Pinu Pahar			TF	716,950,000
	4 Pandawai			TF	762,250,000
	5 Rindi			TF	777,550,000
	6 Pahunga Lodu			TF	777,550,000
	7 Faberiwai			TF	762,250,000
	8 Karura			TF	770,800,000
	9 Kahaungu Eti			TF	792,900,000
	10 Matawai La Pawu			TF	716,950,000
7	KAB. LEMBATA	1	4		3,772,400,000
	1 Aladei			TF	902,850,000
	2 He Ape			TF	915,350,000
	3 Lehatukan			TF	935,850,000
	4 Omesuri			TF	1,018,350,000
8	KAB. ROTE NDAO	1	5		3,979,650,000
	1 Rote Barat Laut			TF	851,100,000
	2 Rote Tengah			TF	762,250,000
	3 Pantai Baru			TF	823,500,000
	4 Rote Timur			TF	762,250,000
	5 Rote Barat Daya			TF	777,550,000
9	KAB. MANGGARAI TIMUR	1	6		5,906,350,000
	1 Borong			TF	952,350,000
	2 Foco Ranaka			TF	1,022,550,000
	3 Leunba Loda			TF	1,051,350,000
	4 Sembi Rampas			TF	985,350,000
	5 Elar			TF	902,850,000

NO	PROVINSI / KABUPATEN / KECAMATAN		JUMLAH		SUMBER	TOTAL ALOKASI
			KAB	KEC		
1	2		3	4	5	6
		6 Kota Komba			TF	991,900,000
10	KAB. KUPANG		1	17		14,869,850,000
		1 Semau			TF	777,550,000
		2 Sulamu			TF	1,117,250,000
		3 Fatuleu			TF	1,163,200,000
		4 Takari			TF	1,163,200,000
		5 Fatuleu Tengah			TF	716,350,000
		6 Amabi Oefeto Timur			TF	1,163,200,000
		7 Amboang Barat Daya			TF	721,300,000
		8 Fatuleu Barat			TF	1,086,650,000
		9 Kupang Barat			TF	838,800,000
		10 Kupang Tengah			TF	767,850,000
		11 Amarasi			TF	781,950,000
		12 Nekamese			TF	810,150,000
		13 Amarasi Barat			TF	777,550,000
		14 Amarasi Timur			TF	716,350,000
		15 Semau Selatan			TF	716,950,000
		16 Amabi Oefeto			TF	753,700,000
		17 Taebenu			TF	767,850,000
5	SULAWESI BARAT		4	22		22,647,800,000
1	KAB. MAMUJU		1	4		3,992,050,000
		1 Kalukku			TF	838,400,000
		2 Kalumpang			TF	1,209,100,000
		3 Mamuju			TF	720,100,000
		4 Tommo			TF	1,224,450,000
2	KAB. MAMUJU TENGAH		1	1		1,178,500,000
		1 Budong-Budong			TF	1,178,500,000
3	KAB. POLEWALI MANDAR		1	10		9,737,850,000
		1 Tubi Taramann (Tutulu)			TF	1,209,100,000
		2 Matangnga			TF	762,250,000
		3 Bakaupa			TF	1,151,850,000
		4 Amecapi			TF	719,300,000
		5 Allu (Induk)			TF	1,132,550,000
		6 Binuang			TF	1,138,900,000
		7 Tapango			TF	1,207,500,000
		8 Mapili			TF	824,200,000
		9 Lanyo			TF	810,150,000
		10 Dulo			TF	781,950,000

NO	PROVINSI / KABUPATEN / KECAMATAN		JUMLAH		SUMBER	TOTAL ALOKASI
			KAB	KEC		
1	2		3	4	5	6
	4	KAB. MAJENE	1	7		7,739,400,000
		1 Pamboang			TF	1,221,650,000
		2 Sendana			TF	1,235,750,000
		3 Malunda			TF	1,179,300,000
		4 Uhumanda			TF	1,122,850,000
		5 Tamnucrodo Sendana			TF	1,108,700,000
		6 Tubo Sendana			TF	1,100,150,000
		7 Banggae Timur			TF	771,000,000
6	SULAWESI UTARA		3	25		19,811,950,000
	1	KAB. KEPULADAN SANGHE	1	8		6,847,450,000
		1 Tabukan Tengah			TF	939,650,000
		2 Tabukan Selatan			TF	878,450,000
		3 Kendalic			TF	786,550,000
		4 Tabukan Selatan Tenggara			TF	755,950,000
		5 Manganitu Selatan			TF	863,100,000
		6 Tamake			TF	970,300,000
		7 Manganitu			TF	939,650,000
		8 Marore			TF	713,800,000
	2	KAB. KEPULADAN TALAUD	1	12		9,107,050,000
		1 Beo			TF	710,000,000
		2 Essang			TF	786,550,000
		3 Kabarnan			TF	862,300,000
		4 Deo Utara			TF	755,950,000
		5 Deo Selatan			TF	771,250,000
		6 Essang Selatan			TF	801,900,000
		7 Raintis			TF	832,500,000
		8 Namusa			TF	812,850,000
		9 Damau			TF	796,300,000
		10 Melonguane Timur			TF	755,950,000
		11 Pulutan			TF	740,650,000
		12 Miangas			TF	180,850,000
	3	KAB. MINAHASA UTARA	1	5		3,857,450,000
		1 Kauditan			TF	709,750,000
		2 Wori			TF	961,300,000
		3 Kalawat			TF	709,750,000

NO	PROVINSI / KABUPATEN / KECAMATAN		JUMLAH		SUMBER	TOTAL ALOKASI
			KAB	KEC		
1	2		3	4	5	6
		4	Likupang Barat		TF	761,300,000
		5	Likupang Timur		TF	715,350,000
7	GORONTALO		4	22		18,335,650,000
	1	KAB. GORONTALO		9		7,679,150,000
		1	Batudaa		TF	758,100,000
		2	Tibawa		TF	1,076,450,000
		3	Batudaa Pantai		TF	792,900,000
		4	Boliyohuto		TF	822,700,000
		5	Tolangohula		TF	848,500,000
		6	Mootilango		TF	783,900,000
		7	Puhbala		TF	796,850,000
		8	Tilango		TF	953,100,000
		9	Dongomeme		TF	866,650,000
	2	KAB. BOALEMO		5		4,178,000,000
		1	Paguyaman		TF	938,950,000
		2	Wonosari		TF	835,600,000
		3	Tilamuta		TF	809,750,000
		4	Manunggu		TF	771,000,000
		5	Estunete		TF	822,700,000
	3	KAB. POHUWATO		3		2,244,060,000
		1	Marisa		TF	758,100,000
		2	Patilunggio		TF	732,250,000
		3	Tahditi		TF	753,700,000
	4	KAB. GORONTALO UTARA		5		4,234,450,000
		1	Atinggola		TF	917,500,000
		2	Sumadata		TF	810,150,000
		3	Gentuna Rava		TF	861,850,000
		4	Sumalata Timur		TF	848,900,000
		5	Toliinggula		TF	796,050,000
8	MALUKU		3	24		26,609,150,000
	1	KAB. MALUKU TENGAH		12		13,928,900,000
		1	Saparua		TF	1,279,350,000
		2	Pulau Haruku		TF	1,187,500,000
		3	Sekadutu		TF	1,096,250,000
		4	Leilitu		TF	1,143,950,000
		5	Seram Utara		TF	1,202,800,000
		6	Barat		TF	1,202,800,000
		6	Teluk Elpa Putih		TF	1,117,700,000

NO	PROVINSI / KABUPATEN / KECAMATAN	JUMLAH		SUMBER	TOTAL ALOKASI
		KAB	KEC		
1	2	3	4	5	6
	7 Amahai			TF	1,233,450,000
	8 Teon Nila Serua			TF	1,264,050,000
	9 Seram Utara			TF	1,218,100,000
	10 Banda			TF	1,283,300,000
	11 Tehoru			TF	1,172,200,000
	12 Nusakaut			TF	728,250,000
2	KAB. MALUKU TENGGARA	1	6		7,076,350,000
	1 Kei Kecil			TF	1,355,900,000
	2 Kei Besar			TF	1,310,600,000
	3 Kei Besar Selatan			TF	1,250,350,000
	4 Kei Besar Utara Timur			TF	1,167,850,000
	5 Kei Kecil Timur			TF	1,218,100,000
	6 Kei Kecil Barat			TF	743,550,000
3	KAB. MTH	1	6		5,603,900,000
	1 Selaru			TF	1,126,250,000
	2 Tanimbar Utara			TF	1,141,550,000
	3 Yam			TF	712,950,000
	4 Wuarlabohar			TF	1,151,300,000
	5 Kormomolin			TF	771,200,000
	6 Nirummas			TF	697,650,000
9	SUMATERA SELATAN	5	30		49,932,250,000
	KAB. OGAN KOMERING ILIR	1	8		13,944,400,000
	1 Tanjung Labuk			TF	2,113,300,000
	2 Jejawi			TF	2,014,500,000
	3 Mesuji			TF	1,500,050,000
	4 Lempuing			TF	1,523,050,000
	5 Sungai Menaug			TF	1,552,350,000
	6 Cengal			TF	1,665,350,000
	7 Mesuji Makmur			TF	1,561,300,000
	8 Teluk Gelam			TF	2,014,500,000
2	KAB. MUSI BANYUASIN	1	6		8,021,950,000
	1 Leis			TF	1,602,500,000
	2 Sungai Keruh			TF	1,265,400,000
	3 Bayung Lencir			TF	1,726,600,000
	4 Plakat Tinggi			TF	1,466,650,000
	5 Babat Supat			TF	900,050,000
	6 Tungkajaya			TF	1,060,750,000

NO	PROVINSI / KABUPATEN / KECAMATAN		JUMLAH		SUMBER	TOTAL ALOKASI
			KA B	KE C		
1	2		3	4	5	6
	3	KAB. BANYUASIN	1	7		13,644,900,000
		1 Banyuasin I			TF	1,985,500,000
		2 Banyuasin II			TF	1,665,350,000
		3 Pulau Rimau			TF	2,261,050,000
		4 Muara Telang			TF	2,062,050,000
		5 Makarti Jaya			TF	1,573,500,000
		6 Rantau Bayur			TF	2,138,600,000
		7 Suak Tapah			TF	1,558,850,000
	4	KAB. OKU SELATAN	1	6		9,532,700,000
		1 Banding Agung			TF	2,088,050,000
		Muara Dua				1,037,300,000
		2 Kisanu			TF	
		3 Simpang			TF	1,907,150,000
		4 Buay Rujung			TF	1,459,450,000
		5 Mekakan Ilir			TF	1,181,750,000
		6 Kisanu Tinggi			TF	1,516,000,000
	5	KAB. EMPAT LAWANG	1	3		4,788,300,000
		1 Muara Pincang			TF	3,100,950,000
		2 Lintang Kanan			TF	2,010,500,000
		3 Sikap Dalam			TF	676,850,000
10	KALIMANTAN BARAT		9	54		79,843,400,000
	1	KAB. KETAPANG	1	11		14,114,660,000
		1 Manis Mata			TF	1,751,900,000
		2 Kendawangan			TF	1,718,850,000
		3 Sاندائ			TF	988,800,000
		4 Sungai Laur			TF	1,572,350,000
		5 Simpang Hulu			TF	1,148,350,000
		6 Matan Hillir				1,573,500,000
		7 Selatan			TF	
		8 Muara Pawan			TF	927,550,000
		9 Hulu Sungai			TF	2,015,300,000
		10 Air Upas			TF	942,900,000
		11 Pemahan			TF	671,650,000
		Sungai Melayu Kayak			TF	823,500,000
	2	KAB. SINTANG	1	5		9,826,700,000
		1 Ketungau Hillir			TF	2,295,850,000
		2 Kayan Hillir			TF	3,111,900,000
		3 Kelam Permai			TF	2,077,350,000
		4 Sungai Tebelian			TF	1,353,100,000
		5 Bujai Hillir			TF	1,985,500,000

NO	PROVINSI / KABUPATEN / KECAMATAN	JUMLAH		SUMBER	TOTAL ALOKASI
		KAB	KEC		
1	2	3	4	5	6
3	KAB. KAPUAS HULU	1	7		9,146,050,000
	1 Embaloh Hulu			TF	1,258,200,000
	2 Bunut Hulu			TF	1,052,850,000
	3 Jongkong			TF	2,031,450,000
	4 Selimbau			TF	935,850,000
	5 Silat Hitam			TF	2,048,350,000
	6 Puhussiban Selatan			TF	919,300,000
4	KAB. BENGKAYANG	1	9		10,225,150,000
	1 Ledo			TF	650,800,000
	2 Seluas			TF	716,950,000
	3 Sanggau Ledo			TF	507,500,000
	4 Monterado			TF	1,972,150,000
	5 Teriak			TF	2,092,650,000
	6 Sungai Betung			TF	1,873,350,000
	7 Sungai Kaya			TF	887,850,000
	8 Kepulauan			TF	777,550,000
	9 Lembah Bawang			TF	716,350,000
5	KAB. LANDAK	1	4		8,139,400,000
	1 Mempawah Hulu			TF	2,077,350,000
	2 Menyuke			TF	2,062,050,000
	3 Sengah Temila			TF	2,011,500,000
6	KAB. SEKADAU	1	4		4,812,850,000
	4 Kusda Behe			TF	1,987,500,000
	1 Sekadam Hulu			TF	1,166,650,000
	2 Nanga Mahap			TF	1,438,400,000
	3 Belitang Hulu			TF	1,454,100,000
	4 Belitang			TF	753,700,000
7	KAB. MELAWI	1	6		9,341,250,000
	1 Nanga Pinoh			TF	1,065,350,000
	2 Menukung			TF	2,130,850,000
	3 Tanah Pinoh			TF	988,800,000
	4 Sokau			TF	2,114,350,000
	5 Belinbing Hulu			TF	927,550,000
	6 Pinoh Barat / Utara			TF	2,111,350,000
8	KAB. KAYONG UTARA	1	3		4,492,850,000
	1 Sukadana			TF	1,396,050,000
	2 Pulau Maya			TF	1,899,850,000
	3 Seponti			TF	1,196,950,000

NO	PROVINSI / KABUPATEN / KECAMATAN		JUMLAH		SUMBER	TOTAL ALOKASI
			KAB	KEC		
1	2		3	4	5	6
	9	KAB. KUBU RAYA	1	5		9,744,500,000
		1 Sungai Raya			TF	1,561,300,000
		2 Terentang			TF	1,954,900,000
		3 Batu Ampar			TF	2,064,850,000
		4 Kubu			TF	2,147,350,000
		5 Sungai Kekap			TF	3,016,100,000
11	KALIMANTAN TENGAH		8	46		46,100,400,000
	1	KAB. KAPUAS	1	10		11,959,250,000
		1 Kapuas Kuala			TF	1,604,100,000
		2 Kapuas Barat			TF	2,000,800,000
		3 Pulau Petak			TF	1,986,300,000
		4 Basarang			TF	1,152,500,000
		5 Kapuas Tengah			TF	1,019,850,000
		6 Kapuas Hulu			TF	886,350,000
		7 Tamban Catur			TF	736,050,000
		8 Pasak Talawang			TF	688,200,000
		9 Mandan Talawang			TF	700,350,000
		10 Bataguh			TF	884,750,000
	2	KAB. BARITO UTARA	1	4		3,817,000,000
		1 Mentallat			TF	970,350,000
		2 Gunung Purei			TF	823,500,000
		3 Teweh Timur			TF	1,003,300,000
		4 Ledrei			TF	1,019,850,000
	3	KAB. KATINGAN	1	7		6,099,500,000
		1 Kaupiang			RM	574,900,000
		2 Pulau Malau			RM	681,450,000
		3 Marikit			RM	682,650,000
		4 Katingan Hulu			RM	1,116,850,000
		5 Katingan Kuala			RM	1,031,300,000
		6 Tasik Payawan			RM	499,550,000
		7 Petak Melai			RM	1,182,800,000
	4	KAB. SERUYAN	1	5		4,632,250,000
		1 Seruyan Hilir			TF	1,108,200,000
		2 Seruyan Tengah			TF	925,350,000
		3 Iknau			TF	1,053,700,000
		4 Seruyan Hulu			TF	807,350,000
		5 Danau Seluluk			TF	739,650,000
	5	KAB. LAMANDAU	1	5		4,087,850,000
		1 Lamandau			TF	638,200,000
		2 Bulik			TF	988,800,000

NO	PROVINSI / KABUPATEN / KECAMATAN	JUMLAH		SUMBER	TOTAL ALOKASI
		KAB	KEC		
1	2	3	4	5	6
	3 Bulik Timur			TF	1,003,300,000
	4 Sematu Jaya			TF	693,700,000
	5 Batang Kawa			TF	743,850,000
6	KAB. GUNUNG MAS	1	5		4,326,350,000
	1 Sepang			TF	693,700,000
	2 Kurun			TF	1,031,750,000
	3 Rungan			TF	1,019,450,000
	4 Manuhing Raya			TF	838,800,000
	5 Mihing Raya			TF	739,650,000
7	KAB. PULANG PISAU	1	5		5,527,500,000
	1 Kahayan Tengah			TF	852,500,000
	2 Banama Tingang			TF	884,750,000
	3 Kahayan Hilir			TF	1,396,050,000
	4 Maliku			TF	1,016,650,000
	5 Sebangau Kuala			TF	777,550,000
8	KAB. MURUNG RAYA	1	5		5,650,700,000
	1 Murung			TF	1,031,750,000
	2 Tanah Siang			TF	1,250,850,000
	3 Laung Tulup			TF	1,231,350,000
	4 Sumber Barito			TF	792,900,000
	5 Uut Murung			TF	737,850,000
TOTAL		66	499		526,316,754,000

MENTERI DESA,
PEMBAKTIAN DAERAH TERTINGGAL
DAN TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA,

MARWAN JAFAR